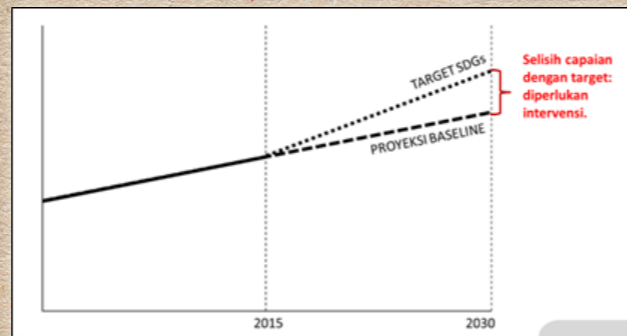


**Kebijakan dan Isu Strategis:
"Semangat SDGs Dalam Informasi Geospasial"**



atau *trend forecasting*, selain itu juga perlu menyusun *Score Card* sebagai dasar penilaian perbandingan hasil proyeksi *baseline* dengan target SDGs 2030. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Ilustrasi gap capaian dengan target

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan program global yang sedang dijalankan di semua negara anggota PBB, tidak terkecuali Indonesia. SDGs menawarkan kerangka pelaksanaan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan serta memastikan 'Tidak Ada Satu pun Yang Tertinggal (*No One Left behind*)'. Melibatkan aktor pemerintah & non pemerintah (K/L, Filantropi & Pelaku Usaha, Akademisi & Ormas).

Badan Informasi Geospasial (BIG), sudah tentu ikut berkontribusi melalui pemanfaatan informasi geospasial yang menjadi tugas dan fungsinya, antara lain melakukan integrasi spasial dengan statistik untuk menggambarkan capaian SDGs baik nasional, provinsi, bahkan pada level detil yaitu desa. Atlas Indikator TPB telah disusun sejak 2019 hingga saat ini, namun baru sebatas menampilkan data statistik dalam peta. Mungkin belum sepenuhnya sesuai apa yang diharapkan dari tujuan dibentuknya SDGs ini. Sejatinya informasi SDGs yang dituangkan dalam bentuk atlas saat ini belum menampilkan informasi yang sesuai dengan "ruh" SDGs. Apakah "ruh" yang dimaksud? Yaitu informasi geospasial yang menyajikan gap atau kesenjangan antara capaian setiap indikator saat ini dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMN atau target jangka panjang 2030, sehingga informasi geospasial tersebut dapat membantu pemerintah dalam menentukan intervensi apa dan dimana yang harus menjadi fokus penanganan pemerintah.

Tentunya untuk melakukan analisis lebih lanjut, BIG tidak bisa bekerja sendiri, namun diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik antar K/L, terutama dengan Bappenas melalui Sekretariat SDGs Nasional SDGs dan BPS serta K/L produsen data SDGs. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan *trend projection*

• Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesiapan

Scorecard	Keterangan	Poin
A	Mencapai atau hampir mencapai target SDG's Asumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mencapai atau hampir mencapai 97.5% target SDG's	4
B	Mendekati target SDG's Asumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mendekati target SDG's dan mencapai setidaknya 90% target SDG's	3
C	Masih seperempat jalan lagi menuju target SDG's Asumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mengarah kepada target SDG's dan mencapai setidaknya 75% target SDG's	2
D	Baru setengah jalan menuju target SDG's Asumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mengarah kepada target SDG's dan mencapai setidaknya 50% target SDG's	1
E	Masih cukup jauh mencapai target SDG's Asumsi business-as-usual, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator tersebut masih kurang dari 50% target SDG's	0

Score Card

Dengan menghasilkan status capaian yang ditampilkan dalam peta (dengan warna merah/belum tercapai sampai dengan hijau/tercapai) dan disertai narasi yang menjelaskan informasi tersebut, diharapkan para pengambil kebijakan dapat melihat wilayah mana yang masih jauh tertinggal dalam mencapai target SDGs, sehingga muncul kebijakan untuk mengintervensi dalam rangka membantu mencapai target yang telah ditentukan. Nah, inilah informasi yang sejatinya diharapkan bagi pengambil kebijakan melalui integrasi spasial dan statistik tersebut. Untuk mencapai hasil sampai tahap ini diperlukan komitmen bersama terutama yang berkaitan dengan ketersediaan data, sehingga analisis dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan informasi yang tepat. [Niendyawati, 2020].



Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Bangunan F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/



Media Informasi Pemetaan Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas

Catatan Beranda

Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Oktober merupakan bulan istimewa bagi Badan Informasi Geospasial yang pada tahun ini telah 51 tahun berdiri. Semangat Sumpah Pemuda: Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, dilanjutkan oleh BIG dengan semangat Satu Data, Satu Peta dan Satu Nusantara. Seperti kata Presiden Jokowi: "Saat ini data adalah new oil. Bahkan lebih, bahkan lebih berharga dari minyak," Jumat (24/1/2020). Dengan Data yang akurat, komplit, aktual, mudah diakses dan diberbagipakaikan, maka perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan/ evaluasi-nya dapat direalisasikan dengan baik.

Sudah lebih dari lima dasawarsa, Badan Informasi Geospasial belum mampu menyediakan data pada skala besar yang saat ini diperlukan untuk berbagai pembangunan di segala bidang. Penyusunan Pemetaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terkendala dengan ketersediaan Peta Dasar Skala 1:5K, sehingga sering sekali penyusunan RDTR menyesuaikan dengan ketersediaan data. Dalam penyusunan RDTR dibagi 4 cluters sesuai dengan ketersediaan Data: a). Peta Dasar sudah tersedia, b). Peta Dasar belum tersedia, namun tersedia CSRT teroktorektifikasi oleh BIG, c). Tersedia CSRT dengan Orthosistematik dari LAPAN, dan d). Cakupan wilayah yang belum ada sumber data yang memadai untuk penyusunan Peta Dasar. Oleh karena itu, penyusunan RDTR yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sangat mengharapkan ketersediaan Peta Dasar 1:5K yang dilakukan lewat program Akselerasi yang direncanakan oleh BIG. Selama peta dasar yang ideal untuk penyusunan RDTR belum tersedia, maka the best available data menjadi alternatifnya walaupun kadang belum memadai.

Ketersediaan Peta Dasar untuk penyelenggaraan Tata Ruang menjadi tantangan bagi BIG, karena terdapat aturan tentang penggunaan Peta Dasar Lainnya yang diatur dalam Undan Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja, yakni: "Dalam hal Peta Dasar belum tersedia, pen5rusunan rencana tata ruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar lainnya". Di sisi lain, keberadaan peta dasar lainnya tidak dikenal dalam Undang Undang IG, sehingga penyusunan peta dasar lainnya juga harus sejalan dengan prinsip Satu Data dan Satu Peta. Oleh karena itu, penyelenggaraan peta dasar lainnya sudah semestinya dilaksanakan dengan persetujuan Badan Informasi Geospasial sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk penyediaan Peta Dasar.

Peta dasar lainnya, tidak akan pernah ada jika BIG mampu merespon dan menyediakan Peta Dasar yang diperlukan untuk penyelenggaraan Rencana Tata Ruang. Dengan demikian, pemenuhan ketersediaan Peta Dasar untuk RTR hendaknya diprioritaskan walaupun kebutuhan prioritasnya belum teridentifikasi dengan baik. Sudah menjadi harapan dan rencana

strategis BIG untuk dapat menyelesaikan ketersediaan Peta Dasar Rupa Bumi yang meliputi seluruh wilayah darat NKRI, mencakup kurang lebih 1.9 juta kilometer persegi.

Selain itu, Garis Pantai dan Batas Wilayah juga mewarnai isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tata Ruang. Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, yakni RTRW P/K, RDTR selalu berkorelasi dengan wilayah administrasi. Mengapa perlu garis pantai? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, garis pantai merupakan batas wilayah administrasi untuk Kota/ Kabupaten yang berbatasan dengan laut, sedangkan Pasal 27 ayat 3 ditetapkan bahwa batas pengelolaan wilayah laut antar daerah provinsi adalah paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dari masing-masing provinsi. Mengapa perlu Batas Wilayah sampai batas Desa/Kelurahan? Batas Wilayah Administratif diperlukan dalam penyusunan RTRW sesuai dengan wilayah Provinsi dan Kota/Kabupaten. Sedangkan penentuan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) biasanya juga disusun dengan mempertimbangkan wilayah desa/kelurahan yang terakup. Walaupun tidak ada keharusan bahwa cakupan BWP harus mengikuti batas desa/kelurahan, namun dengan mempertimbangkan keberadaan batas tersebut akan menjadikan perencanaan lebih baik.



Ulang tahun BIG yang ke 51, pada Oktober 2020 merupakan momentum untuk penyediaan Data dan Informasi Geospasial yang lebih baik, lebih akurat, lebih aktual dan komplit untuk memenuhi kebutuhan para pengguna khususnya Peta Dasar untuk penyelenggaraan Tata Ruang. Penyusunan IG harus sesuai standard sehingga pelaksanaan kebijakan Satu Data dan Satu Peta untuk membangun Satu Nusantara bisa terlaksana sesuai harapan bangsa Indonesia.

Akhirnya, beranda ini kita tutup dengan semangat para Pemuda: Bersatu kita Teguh, Berkarya kita Jaya, Bersama Kita Bisa membangun Indonesia Maju Damai Sejahtera. [Dr.-Ing. Khafid]

REDAKSI:

| **Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | **Tim Redaksi**: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| **Editor**: Prita Brada Bumi, Sri Eka Wati, Chintia Dewi, Izzuddin Abdul Aziz |
| **Desain Tata Letak**: Gin Gin Gustiar |

Harmonisasi dalam Peninjauan Kembali dan Revisi Perpres RTRKSN Perkotaan Kedungsepur dengan RZKSN Kawasan Kedungsepur

Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional baik dari aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, dan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Terdapat dua rezim dalam penyusunan rencana ruang KSN yaitu rezim darat yang diatur pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) melalui Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN) dan rezim laut yang diatur pada Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) melalui Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN). Pada wilayah perencanaan yang berdampingan antara RTR KSN dan RZKSN sangat penting terdapat perencanaan ruang yang terintegrasi dan harmonis.

Pada tanggal 16 Oktober 2020 telah diselenggarakan pembahasan secara daring tentang teknis pemetaan dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) dan revisi Perpres No. 78 Tahun 2017 tentang RTRKSN Perkotaan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran Salatiga, Semarang, dan Purwodadi) dengan Raperpres RZKSN Kawasan Kedungsepur. Pembahasan dihadiri oleh tiga pihak yaitu Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN, Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian KP, dan Kepala Pusat Pemetaan dan Tata Ruang dan Atlas BIG.

Dalam pembahasan, permasalahan pokok yang dibicarakan antara lain tentang tumpang tindih batas wilayah perencanaan yang disebabkan penggunaan data garis pantai yang berbeda versi tahunnya. Setidaknya terdapat 19 lokasi yang terindikasi terjadi tumpang tindih batas wilayah perencanaan darat dan laut. Selain itu, juga dibahas tentang integrasi perencanaan wilayah darat dan laut pada lokasi terjadinya perubahan garis pantai secara masif

dimana sebagian lahan berstatus kepemilikan masyarakat.

Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas menegaskan bahwa garis pantai bersifat dinamis dan pada peta dasar digambarkan sesuai dengan kondisi eksisting suatu wilayah. Pemetaan Tata Ruang pada prinsipnya mengacu pada garis pantai dalam peta dasar Rupabumi. Adapun terkait dengan perencanaan tata ruang selama 20 tahun kedepan dimungkinkan rencana perubahan garis pantai yang dimuat dalam rencana pola ruangnya.

Sebagai tindak lanjut, disepakati bahwa Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KP akan melakukan konsultasi teknis kepada Badan Informasi Geospasial untuk membahas detail pemetaan RTRKSN Perkotaan Kedungsepur dan RZKSN Kawasan Kedungsepur. [Iwan E. Setyawan, 2020].



Gambar 1. Indikasi tumpang tindih batas wilayah perencanaan (19 lokasi) antara RTRKSN Perkotaan Kedungsepur dan RZKSN Kawasan Kedungsepur

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Sinjai

Hari Jumat, 16 Oktober 2020, rombongan DPRD Kabupaten Sinjai yang berjumlah delapan orang melakukan kunjungan kerja di Badan Informasi Geospasial. Rombongan diterima oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA), Dr.-Ing. Khafid, dan Koordinator Pembinaan Pemetaan Tata Ruang di Aula Badan Informasi Geospasial. Pertemuan tatap muka ini dilaksanakan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M).

Dr.-Ing. Khafid, dalam sambutannya, mengucapkan selamat datang dan menjelaskan pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang dalam perencanaan pembangunan. Rencana Tata Ruang yang telah disahkan dapat menjadi *guideline* dan kejelasan pengembangan wilayah dalam 20 tahun mendatang. Rencana tata ruang yang jelas dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor, sehingga investasi bisa berjalan dengan mudah, serta masyarakat paham akan arah pengembangan wilayah dan dapat ikut menjaga area-area yang perlu dilestarikan ataupun dilindungi.

Kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Sinjai pada kesempatan ini sangat terkait erat dengan telah diterbitkannya surat rekomendasi Peta Revisi RTRW Kabupaten Sinjai dari BIG pada tanggal 30 Januari 2020. DPRD Kabupaten Sinjai juga memanfaatkan kunjungan ini untuk mengkonfirmasi ulang terkait aspek perpetaan dalam Peta Revisi RTRW Kabupaten Sinjai agar sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang telah disetujui oleh DPRD. Harapannya, rencana umum tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dapat berjalan harmonis dan dapat menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. [Irham Habib Anggara, 2020].

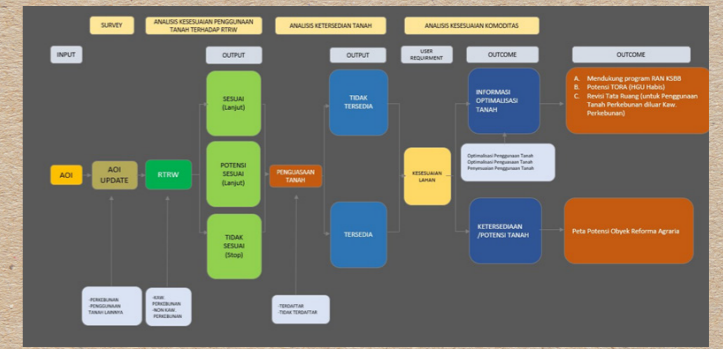


FGD Konsinyering Pengolahan dan Analisa Kegiatan Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan



Kementerian ATR/BPN, melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Penatagunaan Tanah, pada tahun 2020 melakukan penyusunan *prototype* Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan di wilayah Jawa Barat yang nantinya akan diaplikasikan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dalam penyusunan *prototype* tersebut, Direktorat Penatagunaan Tanah mengundang beberapa K/L untuk memberikan masukan pada metode yang telah disusun melalui FGD Konsinyering Pengolahan dan Analisa Kegiatan Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan..

Dalam acara yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 Oktober 2020 tersebut, BIG diminta untuk memberikan masukan terkait analisis spasial serta kaidah pemetaan yang dilakukan dalam



setiap tahapan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan. Selain dari BIG, FGD tersebut juga dihadiri dari Kementerian Pertanian yang memberikan masukan terkait dasar-dasar dan definisi dari istilah-istilah yang digunakan terutama yang berkaitan dengan perkebunan.

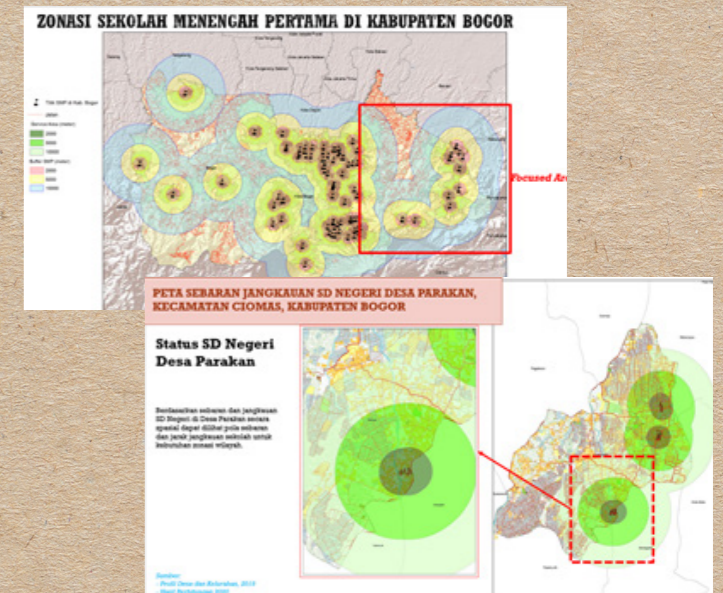
Setelah pemaparan awal dari Direktorat Penatagunaan Tanah, acara dilanjutkan dengan pembagian peserta kedalam tiga desk. Masing-masing desk, memiliki wilayah kerja tersendiri yang dibagi berdasarkan unit administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Melalui desk tersebut, dapat diketahui secara teknis tahapan-tahapan Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah sehingga pihak yang terlibat bisa langsung memberikan masukan apabila terdapat tahapan yang kurang sesuai. [Noor Adhi Sakti, 2020].

Koordinasi Persiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BIG dan BKKBN

Dalam rangka kegiatan Integrasi Spasial Statistik, Pusat PTRA khususnya pada kelompok kerja Integrasi IGT Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, telah menjajaki kerjasama dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Hal ini untuk menjawab tantangan dalam melengkapi sumber data yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pemetaan indikator SDGs di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu lembaga dimaksud adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. BKKBN menyambut baik inisiasi kerjasama BIG dalam kegiatan Integrasi Spasial Statistik. Hal ini digawangi pula akan dilaksanakannya kegiatan rutin 5 tahunan yang dilaksanakan oleh BKKBN yaitu Pendataan Keluarga 2021 atau PK21.

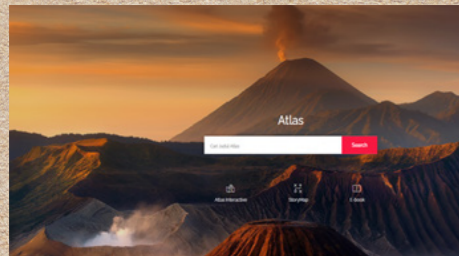
Sebagai tindak lanjut rencana kerjasama ini, pada tanggal 27 Oktober 2020, BKKBN mengundang rapat koordinasi dan persiapan dengan tim dari BIG terkait naskah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang akan ditandatangani pada saat kegiatan *Kick Off Meeting* PK 21. Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui webex dan dihadiri oleh perwakilan tim teknis bidang Integrasi IGT Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, serta perwakilan dari bidang humas dan kerjasama juga bidang hukum BIG. Ruang lingkup kerjasama ini rencananya mencakup berbagai pakai data, pengolahan data, serta penyediaan dan pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik. Dalam rapat ini, tim teknis Bidang IGT Strategis Bidang Sosial Ekonomi dan Lingkungan juga memberikan paparan contoh *prototype* pelaksanaan kegiatan integrasi spasial statistik yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor.



Setelah PKS antara BIG dengan BKKBN ini ditandatangani, nantinya akan dilaksanakan penyusunan rencana aksi. Rencana aksi ini akan merumuskan secara detail langkah-langkah teknis yang akan dilakukan rencana kerjasama dalam lima tahun ke depan.

Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN, Rudi Budiman, sangat mengapresiasi adanya kerjasama ini. Beliau berharap agar hasil kegiatan PK21 BKKBN yang akan dimulai Tahun 2021 dapat menjadi salah satu kunci dalam menjawab tantangan pemetaan indikator SDGs di seluruh Indonesia. Hasil kegiatan integrasi spasial statistik ini, pada akhirnya juga diharapkan dapat menjadi bahan yang powerfull dalam menentukan kebijakan pembangunan di Indonesia. [Moeniroch, 2020].

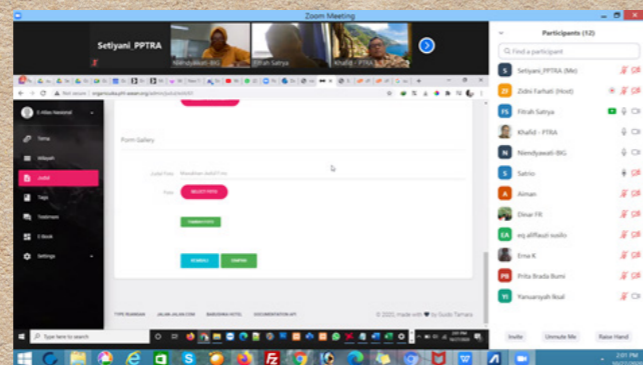
FGD PENGEMBANGAN E-ATLAS



Banyaknya data yang perlu diakomodasi dalam pengembangan atlas, mensyaratkan perlunya penyusunan sistem aplikasi atlas yang handal. Salah satu indikator kehandalan sistem aplikasi adalah kemampuan dalam melakukan organisasi dan pengelolaan beragam data geospasial, data multimedia, data grafik, dan tautan informasi sehingga dapat mudah diakses oleh target pengguna atlas. Pada tahun anggaran 2020 Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas melalui Pokja Atlas menyusun *prototype* pengembangan aplikasi E-Atlas Nasional yang telah dibangun pada tahun sebelumnya. Pengembangan dilakukan pada sisi konten, fitur, dan *user experience* agar pengguna semakin tertarik dan semakin mudah dalam pencarian informasi geospasial terkait wilayah Indonesia. Target pengguna dari pengembangan E-Atlas ini adalah guru/pendidik, pelajar, turis/wisatawan, dan kalangan profesional.

Pada tanggal 27 Oktober 2020, Tim teknis mengadakan FGD untuk membahas kemajuan *prototype* Pengembangan Aplikasi E-Atlas yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata

Ruang dan Atlas. Aplikasi ini dilengkapi dengan 3 fitur utama yaitu atlas interaktif, *story map* dan *e-book*. Pada menu pencarian dilengkapi berdasarkan wilayah dan Tematik. Pembagian wilayah berdasarkan nasional dan *region* (per provinsi). Menu *E-Book* menampilkan buku-buku atlas yang telah disusun dan nantinya dapat diunduh secara utuh maupun per halaman. Selain fasilitas *download E-Book* pengguna juga dapat mengakses/mengunduh peta tematik di bagian *gallery*. Aplikasi E-Atlas ini membutuhkan *storage* agak besar karena memuat foto, video, dan *E-Book*. Diharapkan dengan dikembangkannya aplikasi E-Atlas ini dapat diketahui siapa pengguna dan segmen pasar terbesar pengguna atlas. [Setiyani, 2020].



Working Group III (Integrasi Informasi Geospasial Statistik, UN-GGIM-AP) "Integrating Geospatial Information and Statistics, Answering SDG's Challenge"

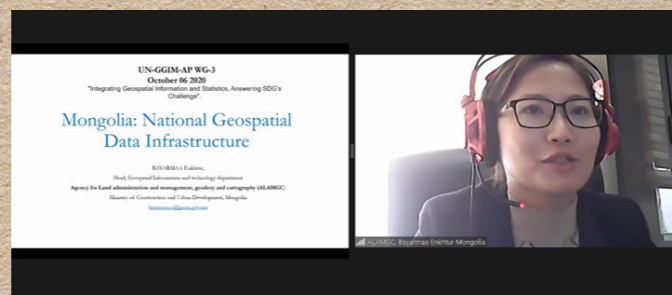
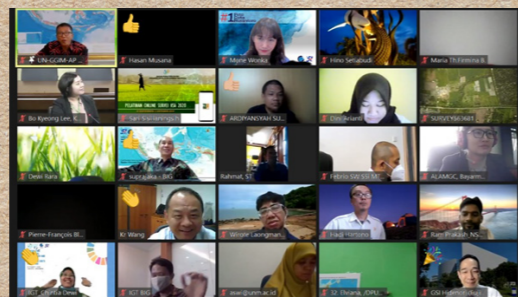
President of UN-GGIM AP, Ms. Alison Rose menyatakan bahwa nilai integrasi informasi geospasial dan statistik terbukti lebih bermanfaat jika diterapkan dalam menangani permasalahan seperti Covid-19 dan bencana alam. Data yang dihasilkan memberikan kemampuan kepada pemangku kepentingan untuk membuat keputusan terbaik berdasarkan analisis yang lebih komprehensif. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka webinar bertajuk "Integrating Geospatial Information and Statistics, Answering SDG's Challenge" pada Rabu, 7 Oktober 2020. Webinar ini diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial sebagai salah satu agenda kegiatan Working Group Integrasi Spasial Statistik, UN-GGIM-AP.

"Tujuan dari webinar ini adalah untuk berbagi pengalaman dari beberapa negara dalam penyelenggaraan integrasi informasi geospasial dan data statistik, khususnya dalam menghadapi isu SDGs dan kebencanaan," ujar Antonius Bambang Wijanarto selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik yang juga menjabat sebagai Ketua Working Group III (Integrasi Informasi Geospasial dan Statistik, UN-GGIM-AP).

Beberapa topik yang menarik disampaikan pada webinar ini antara lain, penggunaan data satelit, R dan QGIS untuk menghasikan perubahan tutupan lahan, integrasi geospasial statistik menggunakan metode "Vector Tiles", Nasional Spasial Data Infrastruktur, integrasi geospasial statistik dalam pemetaan Covid-19, aplikasi geospasial dalam analisis risiko bencana, integrasi geospasial statistik untuk indikator SDGs, dan pengembangan *Grid-based* untuk indikator spasial SDGs.

Webinar ini ditutup oleh Keran Wang, atas nama Sekretaris UN-GGIM AP. Beliau menyoroti pentingnya

integrasi informasi geospasial dan statistik untuk pengurangan risiko bencana dan pencapaian indikator SDGs. Ia juga memaparkan bahwa Covid-19 berdampak buruk bagi banyak negara dalam menerapkan SDGs. Platform khusus untuk mengintegrasikan informasi geospasial dan statistik telah dikembangkan oleh banyak negara untuk menanggapi dampak sosio-ekonomi dari pandemi. Sebagai penutup, beliau menyatakan bahwa kegiatan seperti Webinar hari ini akan terus dilakukan oleh UN-GGIM AP untuk mendukung semua anggotanya. [Gunawan, 2020].



Pelatihan Pemanfaatan Drone untuk Pemetaan, Fotografi, dan Videografi

Pada tanggal 19-20 Oktober 2020, berkerjasama dengan salah satu komunitas drone di Jawa Barat, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas melakukan pelatihan pemanfaatan drone untuk kebutuhan pemetaan serta pemanfaatannya untuk fotografi sekaligus videografi. Pelatihan ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas staf teknis dalam menghadapi perkembangan jaman dan kemajuan teknologi. Kegiatan ini dilakukan di lingkungan Badan Informasi Geospasial baik indoor maupun outdoor dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah.

Pelatihan ini terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu penjelasan teori dan praktek. Materi yang diberikan mencakup prosedur keamanan, pengenalan komponen drone, dasar-dasar penggunaan drone, teknik fotografi dan videografi, hingga teknik akuisi serta pemrosesan data untuk pemetaan. Melalui pelatihan pemanfaatan drone ini, diharapkan staf teknis di Pusat PTRA dapat menggunakan

drone secara handal sebagai salah satu alternatif alat dalam melakukan pemetaan secara cepat dan tepat pada wilayah yang relatif tidak luas. Selain itu, mereka diharapkan juga mampu untuk mengambil aerial photo dan video yang baik sebagai salah satu materi publikasi hasil pekerjaan kepada pengguna di sektor pemerintahan, pendidikan, dan masyarakat umum. [Satrio Jati Kinantyo Widhi, 2020].



FGD II Penyusunan Atlas Taktual

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) menyelenggarakan Focus Group on Discussion (FGD) II dalam rangka penyusunan Atlas Taktual Provinsi Bali pada hari Selasa 6 Oktober 2020. Kegiatan ini melibatkan narasumber dari Lembaga Dria Manunggal. Fokus dari diskusi adalah membahas konversi peta awas menjadi peta taktual dan proses pencetakan. Drs. Setia Adi Purwanta menyampaikan jika manusia dapat menyerap informasi sebesar 83% melalui indera penglihatan, 11% melalui indera pendengaran, 4% melalui indera peraba, 1% melalui indera penciuman, dan 1% dari indera pengecap. Bagi penyandang disabilitas netra yang terbatas menggunakan indera peraba dan indera pendengaran saat belajar atlas, harus dibatasi jumlah tema dalam waktu pembelajaran. Tema yang disepakati untuk Atlas Taktual Provinsi Bali adalah tema administrasi, dengan tampilan isi peta berupa peta administrasi Provinsi Bali dan peta administrasi Kabupaten/Kota. Simbol baru yang ditampilkan pada peta taktual tahun 2020 adalah simbol kantor camat dan batas kecamatan. Penulisan toponim untuk kecamatan disepakati dengan singkatan tiga huruf, misalnya Pupuan disingkat ppn. Saat ini kemajuan dari proses pencetakan peta taktual adalah penatahan master cetak.

Rencana uji pemaknaan atlas taktual akan dilaksanakan di SLB Sanglah, Bali pada akhir November atau awal Desember 2020 dengan dua alternatif pelaksanaan mengingat pandemi covid-19 belum berakhir. Alternatif pertama adalah dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan guru penyandang disabilitas netra. Alternatif kedua adalah dilaksanakan secara daring dengan mengirimkan atlas taktual ke SLB Sanglah kemudian didistribusikan ke siswa penyandang disabilitas netra dan soal-soal terkait pemahaman siswa dibuat dalam bentuk formulir daring. [Erna Kusumawati, 2020].



Resensi Buku: Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19



Pandemi Covid-19 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Buku ini dihadirkan oleh BPS RI sebagai salah satu lembaga negara yang bertugas menyajikan data statistik, agar para pemangku kepentingan bisa menyusun langkah cepat dan strategis dalam menangani Covid-19.

Pada bagian awal, buku ini menyajikan pembahasan mengenai metodologi survei yang digunakan, responden survei yang diambil, serta persepsi kepatuhan, efektivitas dan alasan tidak menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, dibahas pula mengenai hasil survei terkait respon terhadap orang terinfeksi Covid-19 di lingkungan sekitar, frekuensi keluar rumah setelah AKB, penerapan protokol kesehatan, dan persepsi kemungkinan terinfeksi/tertular Covid-19. Pada bagian akhir disampaikan pula bahasan mengenai media paling populer dan berpengaruh untuk informasi Covid-19, perubahan pengeluaran, serta status bekerja responden.

Beberapa hal yang telah disampaikan dalam buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pemecahan masalah terkait. [Adinda Cempaka, 2020].